

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Pemindahan ibu kota ini mencakup banyak urusan didalamnya, yaitu pembangunan infrastruktur dengan modal yang besar, perpindahan tata ruang negara, perubahan kualitas lingkungan, hingga keberlangsungan hidup masyarakat adat setempat. Hal tersebut perlu dipertimbangkan secara matang, terutama dalam keterlibatan masyarakat adat selaku makhluk sosial yang dianggap sebagai pemilik tanah ulayat tersebut. Keberadaan masyarakat adat dalam pembangunan IKN sebagai ibu kota baru menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa proyek pembangunan ini memberikan manfaat yang maksimal baik itu untuk negara maupun masyarakat lokal yang telah lama menempati wilayah IKN. Memperhatikan kepentingan serta aspirasi masyarakat adat dilakukan untuk memahami kebutuhan dan pandangan mereka serta memastikan bahwa suara mereka diakui dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian transparansi informasi untuk keterlibatan masyarakat yang lebih efektif. Informasi terkait rencana pembangunan, dampaknya, dan kebijakan terkait dijelaskan dengan jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Disamping itu, pemberdayaan kapasitas masyarakat lokal menjadi prioritas.

Namun pada kenyataannya, pembangunan IKN ini telah mengesampingkan hak masyarakat adat, terutama hak ekonominya. Dengan menggunakan analisis teori oligarki Hadiz dan Robinson, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan oligarki dalam proses pembangunan IKN berperan signifikan dalam mengatur dan mengontrol kebijakan serta sumber daya ekonomi, yang pada akhirnya memperkuat ketimpangan dan dominasi elit dalam struktur kekuasaan. Dengan mengindikasikan oligarki yang dilihat dari ketujuh indikator oligarki, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat empat indikator oligarki yang terjadi dalam pembangunan IKN, diantaranya yaitu, 1) konsentrasi kekayaan dan sumber daya ekonomi, 2) pengaruh yang tidak proporsional dalam kebijakan publik, 3) monopoli atau oligopoli di sektor-sektor kunci, dan 4) privatisasi dan liberalisasi yang menguntungkan elit.

Kecondongan Pemerintah terhadap para elit ekonomi dalam hal ini menjadi oligarki ekonomi memberikan dampak serius bagi masyarakat adat di sekitar wilayah IKN. Dalam konteks hak ekonomi masyarakat adat, proyek pembangunan IKN memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan hak ekonomi masyarakat. Ditinjau dengan konsep masyarakat adat oleh Hazairin yang mengatakan bahwa masyarakat adat secara umum memiliki hak atas tanah ulayatnya yang digunakan sebagai penopang ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat adat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami diskriminasi serta pelanggaran hak ekonomi melalui adanya perampasan tanah ulayat yang mengancam keberlanjutan ekonomi mereka. Selain itu, secara hak ekonomi universal sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, masyarakat adat juga tidak mendapatkan hak ekonomi dalam kedudukannya sebagai warga negara, yaitu seperti hak mendapatkan pekerjaan dan kelayakan dalam lingkungan kerja. Meski demikian, terdapat upaya advokasi dari AMAN Kalimantan Timur dan WALHI Kalimantan Timur sebagai organisasi non pemerintahan yang memperjuangkan hak masyarakat adat, namun kekuatan perusahaan dan dukungan pemerintah membuat perjuangan masyarakat adat menjadi sangat sulit.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu pemerintah perlu memperhatikan kondisi masyarakat adat yang memiliki telah terdampak maupun yang berpotensi akan terdampak dari pembangunan IKN, khususnya dampak secara ekonomi. Perlu adanya ketegasan dari pemerintah Badan Otorita IKN dalam menyongsong hak dan kewajiban yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat adat, salah satunya dengan menjamin keterlibatan masyarakat adat dalam setiap proses yang berkaitan dengan tanah ulayatnya yang berpotensi secara spesifik akan mempengaruhi kehidupan masyarakat adat dari berbagai aspek. Pemerintah perlu secara serius untuk menghormati dan mempertimbangkan hal-hal pokok dari nilai dan kebudayaan masyarakat adat yang bersangkutan dengan wilayah atau tanah ulayat yang mereka gunakan. WALHI Kalimantan Timur dan AMAN Kalimantan Timur pun

menyarankan untuk memberikan kebebasan berpendapat bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasinya, serta perlu adanya transparansi terkait pembangunan IKN kepada masyarakat adat, sebab wilayah pembangunan tersebut secara harfiah masih merupakan wilayah milik masyarakat adat yang secara turun temurun sudah menetap.

Secara teoritis, penelitian tentang IKN dan kaitannya dengan hak masyarakat adat perlu terus dilakukan tidak hanya dari sudut pandang ilmu politik, namun juga dapat ditelaah lebih mendalam dari sudut pandang sosiologi, geografi, hukum, antropologi, serta kajian lingkungan. Hasil penelitian yang lebih mendalam akan memberikan manfaat dan sangat berharga untuk mengkritik kebijakan serta tindakan pemerintah yang cenderung akan merugikan masyarakat adat yang termarjinalkan.